

**PERANAN BADAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DI BIDANG KEAMANAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KOTA METRO**

SKRIPSI



Oleh:
DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

ABSTRAK

PERANAN BADAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA METRO

Oleh:
DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang: Dalam Peraturan Pemerintah ini. Permasalahan: 1. Bagaimana peranan badan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di bidang keamanan dan ketertiban umum di Kota Metro?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di bidang keamanan dan ketertiban umum di Kota Metro?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris dan normative, penelitian empiris adalah penulis mencoba mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dikaji atau diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yaitu: 1. Secara eksplisit peranan pengawasan Satpol PP dalam keamanan dan ketertiban telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf C dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang ketertiban dan keamanan. 2. Menegakkan Peraturan Daerah, peranan Satpol PP selain berhak melakukan pemeriksaan, dan dapat juga melakukan tindakan pencegahan yang bersifat non yustisial terhadap masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran. 3. Kendala yang dihadapi adalah: sering terjadinya benturan-benturan yang terjadi dikarenakan banyak toko-toko dalam memenuhi persyaratan perijinannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro, antara instansi terkait yang berwenang mengeluarkan perijinan toko sebagai syarat sebuah toko bisa beroperasi, terkadang pemilik toko ada juga berbuat melawan ketentuan yang berlaku, sehingga Satpol PP mengalami kendala dalam mengeksekusi penutupan toko dikarenakan sering mengalami benturan baik dengan instansi terkait maupun masyarakat sekitar.

Saran penulis adalah: 1. Untuk kelancaran di dalam tugasnya, maka kelengkapan sarana dan prasarana Sat Pol PP dicukupi. 2. Di dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan peraturan sebaiknya di lakukan dengan cara-cara yang baik, sopan dan berupa arahan-arahan terlebih dahulu (persuasive). Jangan dengan cara arogansi walaupun di dalam tugas menerima perintah dari atasan, karena hal ini akan dinilai oleh masyarakat cara kerja dari Pol PP tersebut.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE AGENCY IN ENFORCEMENT OF LOCAL REGULATIONS IN THE SECURITY AND SECURITY PUBLIC ORDER IN A METRO CITY

By.
DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

The granting of authority is intended so that the regions can improve services and public welfare in developing democracy as well as increasing equitable development, which is supported by the implementation of good governance. This is in accordance with Article 1 point 2 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. According to Government Regulation (PP) Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Unit Chapter III Article 6, the Civil Service Police are authorized: In this Government Regulation. Problems: 1. What is the role of the Civil Service Police in enforcing regional regulations in the field of security and public order in Metro City?. 2. What are the obstacles faced by the Civil Service Police in enforcing regional regulations in the field of security and public order in Metro City?..

The research method that the author uses is using empirical and normative research methods, empirical research is the author tries to collect data in the field to be studied or processed.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded, namely: 1. Explicitly the role of Satpol PP supervision in security and order is in accordance with the provisions of Article 14 letter C in Law Number 23 of 2014, concerning order and security. 2. Enforce Regional Regulations, the role of Satpol PP in addition to the right to conduct inspections, and can also take non-judicial preventive actions against people who commit a violation. 3. Constraints faced are: frequent clashes that occur because many shops in fulfilling their licensing requirements are not in accordance with what has been set by the Metro City government, between the relevant agencies authorized to issue store permits as a condition for a store to be able to operate, sometimes there are shop owners who also act against the applicable provisions, so that the Satpol PP experiences problems in executing shop closures because they often experience conflicts with related agencies and the surrounding community.

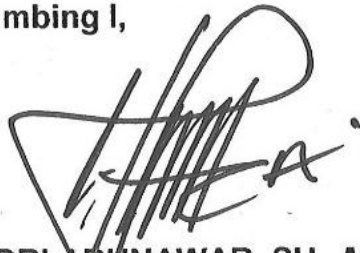
. The author's suggestions are: 1. For smoothness in their duties, the completeness of the Sat Pol PP facilities and infrastructure is sufficient. 2. In carrying out its duties to enforce regulations, it should be done in good, polite ways and in the form of persuasive directions. Don't act arbitrarily even when you're in charge of receiving orders from your superiors, because this will be judged by the community on how the Pol PP works.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **DIYAN CORINNA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 07 Maret 2022

Pembimbing I,



H. HADRI ABUNAWAR, SH., MH
NIDN. 0204016405

Metro, 07 Maret 2022

Pembimbing II,



NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **DIYAN CORINNA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 07 Maret 2022

TIM PENGUJI



H. HADRI ABUNAWAR, SH., MH , Ketua
NIDN. 0204016405



DR. EDY RIBUT HARWANTO, SH., MH , Penguji Utama
NIDN. 0229057401



NITARIA ANGKASA, SH. MH , Sekretaris
NIDN. 0210048502

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIYAN CORINNA

NPM : 18810140

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
"Peranan Badan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Metro".

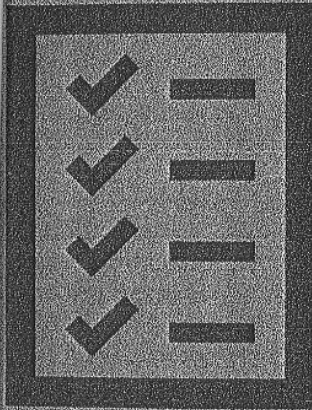
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.



DIYAN CORINNA
NPM. 18810140



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2645/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

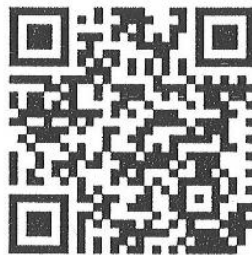
Nama : DIYAN CORINNA
NPM : 18810140
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

**PERANAN BADAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG KEAMANAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA METRO**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



14 Maret 2022

Swarantya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

at:

Hajar Dewantara No. 116
mulyo, Kec. Metro Timur Kota
o, Lampung, Indonesia

site: www.upi.ummetro.ac.id
ail: upi@ummetro.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Nama : DIYAN CORINNA

Tempat Tanggal Lahir:

Nama Ayah :

Nama Ibu :

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2012
3. SMA Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2015
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2016.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2021.

Penulis,



DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

MOTTO

“Diamku lebih berarti dari pada kata-kata yang tidak bermakna”

“jika kamu ingin hidup sukses, fokuslah pada satu tujuan”

(DIYAN CORINNA)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, serta telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberikan kehidupan dan berkah dan rizki-Nya
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepadaku agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan doa ku akan selalu mengalir untuk kalian;
2. Saudara-saudaraku. Selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
3. Keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terimakasih selalu mensupport dan selalu memberikan arahnya. semoga kita selalu diberi kemudahan.aamiin
4. Almamater tercintaku. terimakasih telah memberi cerita.

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada semua pihak yang telah membantu selama menyusun skripsi ini.

Penulis,



DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada-Mu Tuhan, yang dengan segala yang engkau janjikan dan kasih-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; "Peranan Badan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Metro".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, SH., MH, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Nitaria Angkasa, SH .MH, pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak DR. Edy Ribut Harwanto, SH. MH, sebagai Penguji Utama dalam ujian skripsi. Terimakasih yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan isi dari skripsi ini.
6. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 07 Maret 2022



DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Satuan Polisi Pamong Praja	10
B. Peraturan Daerah.....	29
C. Keamanan dan Ketertiban Umum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profile Pamong Praja Kota Metro	41
1. Sejarah Kota Metro	41
2. Batas Wilayah Kota Metro	41
3. Pembagian Wilayah di Kota Metro.....	42
B. Narasumber	56
C. Peranan Badan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Bidang Keamanan Dan Ketertiban Umum di Kota Metro	56
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Bidang Keamanan Dan Ketertiban Umum di Kota Metro	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA